KONDISI SOSIAL DAN POLITIK DALAM WACANA DEBAT KE-4 CALON WAKIL PRESIDEN INDONESIA PEMILU 2024

Lutfi Abdul Majid Amin¹, Nimas Permata Putri², Eny Setyowati³

^{1,2,3}Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, STKIP PGRI Pacitan

Email: luffy.waras100@gmail.com¹, nimaspermatap@gmail.com², enyines76@gmail.com³

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi sosial dan politik yang digambarkan dalam wacana pada debat ke-4 calon wakil presiden Indonesia pada pemilu 2024 dengan menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) model Norman Fairclough. Debat cawapres yang dilaksanakan pada 21 Januari 2024 di Jakarta *Convention Center* dan disiarkan melalui berbagai media, termasuk *YouTube*, dijadikan sebagai objek penelitian untuk memahami bagaimana kondisi sosial dan situasi politik tergambar dalam wacana yang disampaikan. Penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi dan menganalisis teks debat yang ditranskrip dari video *YouTube*. Data dianalisis menggunakan kerangka praktik sosiokultural (*sociocultural practice*) Norman Fairclough. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wacana dalam debat ini tidak hanya memperlihatkan adu argumentasi saja, tetapi juga mencerminkan kondisi sosial dan politik di Indonesia. Selain itu, wacana dalam debat juga digunakan sebagai alat untuk memengaruhi opini dan persepsi masyarakat terhadap para calon.

Kata Kunci: analisis wacana kritis, Norman Fairclough, debat cawapres, kondisi sosial, kondisi politik.

Abstract: *The research objective was to analyze the social and political conditions depicted in the discourse at the fourth debate of Indonesia's vice presidential candidates in the 2024 elections. The Critical Discourse Analysis (CDA) approach of the Norman Fairclough model was employed in this research. The vice presidential debate was held on January 21, 2024, at the Jakarta Convention Center. It was subsequently broadcast via various media outlets, including YouTube, and is the subject of this research project. The objective is to gain insight into how social conditions and political situations are portrayed in the discourse delivered during the debate. This research identified and analyzed debate texts transcribed from YouTube videos. The data was analyzed using Norman Fairclough's sociocultural practice framework. The research results demonstrated that the discourse in this debate exhibited argumentation and reflected the social-political conditions in Indonesia. Furthermore, the discourse in the debate was also utilized to influence people's opinions and perceptions of the candidates.*

Keywords: *critical discourse analysis, Norman Fairclough, vice presidential debate, social conditions, political conditions.*

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (pemilu) merupakan inti dari sistem demokrasi yang memungkinkan masyarakat untuk memilih pemimpin mereka. Dalam konteks pemilu di Indonesia, pemilihan presiden dan wakil presiden selalu menjadi pusat perhatian publik, karena keduanya memegang peran penting dalam pemerintahan negara dan berpengaruh besar terhadap citra Indonesia di kancah internasional. Pemilu tahun 2024 menonjol sebagai momen penting dalam sejarah demokrasi Indonesia, dengan melibatkan lima pemilihan sekaligus, termasuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Dari berbagai tahapan

pemilu, debat calon wakil presiden menjadi sorotan utama karena merupakan wadah bagi para kandidat untuk mengkomunikasikan visi, misi, dan rencana mereka kepada masyarakat.

Debat ke-4 calon wakil presiden pada tanggal 21 Januari 2024 di Jakarta *Convention Center (JCC)* menjadi perhatian luas karena menampilkan tiga kandidat, yaitu Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD, yang membahas isu-isu kritis seperti pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Momen ini tidak hanya menjadi ajang penyampaian gagasan, tetapi juga menjadi representasi dinamika politik dan sosial yang sedang berlangsung di Indonesia.

Dalam konteks penelitian ini, debat ke-4 cawapres dipandang sebagai wacana yang mencerminkan kondisi sosial dan politik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) yang dikembangkan oleh Norman Fairclough dengan dimensi sosiokultural (*sociocultural practice*) sebagai alat analisisnya. Pendekatan tersebut menjadi metode analisis yang komprehensif untuk mengungkap kondisi sosial dan politik di Indonesia.

Norman Fairclough dalam (Eriyanto, 2001:286) menitikberatkan perhatian pada wacana dalam konteks bahasa. Fairclough mengartikan wacana sebagai penggunaan bahasa sebagai praktik sosial, yang lebih menitikberatkan pada aktivitas kolektif daripada kegiatan bahasa yang hanya refleksi pribadi. Bisa diartikan bahwa wacana adalah bentuk bahasa di mana seseorang menggunakan bahasa sebagai suatu perbuatan terhadap dunia atau realitas.

Fairclough mengemukakan beberapa karakteristik Analisis Wacana Kritis (AWK) yang menggabungkan aspek-aspek bahasa dalam konteks pemikiran sosial-politik, yang relevan dengan pengembangan teori sosial dan bahasa. Untuk mewujudkannya, Fairclough dalam (Darma, 2009:196) mengusulkan pendekatan tiga dimensi, di mana kemunculan wacana dipandang secara bersamaan sebagai teks (*text*), praktik diskursif (*discourse practice*), dan praktik sosial (*sociocultural practice*). Namun pada penelitian ini, cukup menggunakan dimensi praktik sosial (*sociocultural practice*) karena sesuai dengan luaran yang akan dihasilkan, yakni wacana yang menggambarkan kondisi sosial dan politik dalam debat cawapres ke-4 pemilu Indonesia 2024.

Kondisi sosial, yang meliputi interaksi sosial, kondisi sosial ekonomi, perubahan sosial, dan konflik sosial, juga menjadi fokus dalam analisis wacana. Soekanto (2002:15) menyatakan bahwa interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu yang mempengaruhi perilaku dan sikap masing-masing, sementara kondisi sosial ekonomi dianggap sebagai faktor kunci dalam menentukan kualitas hidup masyarakat. Durkheim (1893:56) menekankan pentingnya solidaritas sosial dalam menjaga kestabilan selama perubahan sosial, sementara Marx (1867:123) melihat konflik antar kelas sosial sebagai pendorong utama perubahan sosial, yang keduanya memberikan konteks bagi analisis wacana dalam situasi sosial yang kompleks.

Dalam konteks politik, wacana tidak terlepas dari dinamika yang ada di dalamnya. Politik, menurut Budiardjo (2007:15), berusaha menentukan peraturan yang dapat diterima sebagian besar warga untuk menciptakan kehidupan bersama yang harmonis. Dalam wacana politik, seperti dalam debat cawapres pemilu 2024, para calon memaparkan visi dan misi mereka, termasuk strategi untuk menyelesaikan konflik dan mencapai konsensus. Toulmin (1958:12) menggambarkan debat sebagai proses di mana para pihak memperkuat argumen mereka dengan bukti dan logika, yang menjadi esensial dalam pemilihan umum di mana debat cawapres merupakan salah satu tahapan penting. Pemilu, sebagai salah satu aspek penting dalam demokrasi (Dahl, 1971:1), memungkinkan warga negara untuk memilih pemimpin mereka melalui suara rahasia. Dalam konteks ini, calon wakil presiden memainkan peran penting sebagai politisi yang dipilih untuk membantu calon presiden dalam kampanye dan pemerintahan, serta berpotensi menggantikan presiden jika diperlukan (Baumgartner, 2006:45).

Penelitian ini menggunakan platform *YouTube* kanal *TvOne* sebagai sumber pemerolehan data. Kanal *TvOne* dipilih karena merupakan pemberitaan nasional yang terkenal dan aktual. *TvOne* juga memiliki hak siar resmi terhadap acara debat capres dan cawapres pemilu Indonesia 2024. Data diperoleh dari video debat yang diunduh dari kanal *YouTube TvOne* dan kemudian ditranskrip menjadi teks. Selanjutnya teks dianalisis menggunakan dimensi *sociocultural practice* dari Norman Fairclough.

Penelitian ini juga menggunakan referensi dari penelitian terdahulu yang relevan. Pertama, penelitian Erlangga Retanto (2020) yang menganalisis struktur mikro wacana kritis pada acara Mata Najwa bertajuk “Berebut Takhta di Tengah Wabah” dengan

menggunakan teori Teun A. Van Dijk. Penelitian ini menggunakan media *Youtube* dan metode studi pustaka, mirip dengan penelitian ini, namun dengan subjek yang berbeda, yaitu debat ke-4 cawapres Indonesia pemilu 2024. Kedua, penelitian Sudaryanto (2019) yang dipublikasikan pada Prosiding SEMANTIKS, menganalisis aspek gramatikal, leksikal, dan konteks wacana dalam debat pertama capres dan cawapres pemilu 2019. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada objeknya, yaitu wacana debat politik, meskipun subjek dan tahunnya berbeda. Ketiga, penelitian Emil Mahmud, Yetty Morelent, dan Endut Ahadiat yang menggunakan model analisis wacana kritis Teun A. Van Dijk untuk menganalisis debat capres di pilpres 2019 yang diberitakan oleh *TribunPadang.com*. Penelitian ini berbeda dalam hal teori dasar dan sumber data, namun sama-sama mengkaji debat pemilu.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam analisis teks, yang berfokus pada pengamatan terhadap transkrip video dan menghindari prosedur analisis statistik. Moleong (2010:6) berpendapat bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah memahami fenomena secara holistik melalui deskripsi dalam kata-kata dan bahasa, serta memanfaatkan konteks alamiah. Dalam konteks ini, peneliti menggunakan model analisis wacana kritis Norman Fairclough yang menekankan pada bahasa sebagai praktik sosial.

Subjek penelitian ini adalah debat ke-4 calon wakil presiden Indonesia Pemilu 2024, yang sesuai dengan definisi Sugiyono (2010:11) bahwa subjek adalah pihak yang berkaitan dengan objek penelitian. Objek penelitian difokuskan pada wacana dalam debat tersebut, sebagaimana didefinisikan oleh Eriyanto (2001:13) sebagai apa yang menjadi perhatian utama dalam penelitian. Waktu penelitian dibagi menjadi tiga tahap, yaitu prapenelitian, pelaksanaan penelitian, dan pelaporan, yang berlangsung selama tujuh bulan dari Januari hingga Juli 2024. Data yang digunakan adalah video dan transkrip debat, yang diambil dari *YouTube* pada kanal *TvOne*, karena media tersebut mudah diakses dan menawarkan kualitas visual dan audio yang baik.

Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, di mana peneliti mengumpulkan informasi melalui video debat, yang kemudian dianalisis menggunakan kecerdasan buatan untuk mentranskrip video menjadi teks. Menurut Gottschalk (dalam Gunawan, 2013:175), dokumentasi mencakup sumber tertulis untuk informasi sejarah

dan berbagai bentuk bukti. Teknik analisis data mengacu pada model Norman Fairclough dimensi praktik sosiokultural (*sociocultural practice*) untuk mengungkap bagaimana wacana dalam debat cawapres ke-4 pemilu 2024 mencerminkan kondisi sosial dan politik di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Tabel berikut ini merupakan hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan analisis tingkat sosiokultural dalam lingkup kondisi sosial dan politik yang digambarkan oleh para calon wakil presiden pada saat debat. Setiap data akan diberi kode agar memudahkan pengkajian dalam sub bab pembahasan. Berikut kode dan tabel hasil penelitiannya.

Tabel 1. Data Hasil Analisis Tingkat Sosiokultural

No	Pembicara	Ungkapan	Sosial/ Politik		Situasi Yang Digambarkan	Kode
			S	P		
1.	Muhaimin Iskandar	“Krisis iklim harus dimulai dengan etika sekali lagi etika lingkungan. Etika lingkungan ini intinya adalah keseimbangan antara manusia dan alam tidak menang-menangan.”	S		Pentingnya etika lingkungan dalam menghadapi krisis iklim dan perlunya keseimbangan antara manusia dan alam dalam pembangunan	SG1- MU- S1
2.	Muhaimin Iskandar	“Libatkan masyarakat adat, hormati masyarakat adat bukan hanya memakai pakaian adat setahun sekali pada 17 Agustus.”	S		Pernyataan ini menyoroti pentingnya partisipasi dan penghormatan terhadap masyarakat adat dalam proses pembangunan untuk	SG1- MU- S2

				menghindari konflik sosial.	
3.	Muhaimin Iskandar	“Seluruh perangkat undang-undang yang menyangkut perlindungan petani dan produksi kita sebenarnya sudah lengkap, yang dibutuhkan hanyalah implementasi dari seluruh proses hukum yang kita miliki kemampuan politik dan kesungguhan.”	P	Pentingnya implementasi perangkat undang-undang untuk perlindungan petani dan produksi pangan.	SG2-MU-P2
4.	Muhaimin Iskandar	“Dengan pembangunan desa kita membangun dari bawah.”	P	Paradigma pembangunan dari bawah menunjukkan fokus pada pengembangan desa yang lebih inklusif dan berkelanjutan.	SG3-MU-P1
5.	Muhaimin Iskandar	“Banyak masalah yang menjadi kendala terlaksananya reforma agraria salah satunya birokrasi kita kesungguhan politik kita dan kemauan kepemimpinan di bawah presiden. Saya tidak menyalahkan siapapun	P	Muhaimin menyoroti kendala dalam reforma agraria seperti birokrasi dan kesungguhan politik, serta mengajak semua pihak untuk melakukan “tobat ekologis” demi memperbaiki keadaan	SG5-MU-P2

		ya ini sebuah fakta yang harus kita antisipasi bersama. Saya hanya mengajak untuk kita sama-sama tobat ekologis memperbaiki ke depan menjadi lebih baik lagi.”		lingkungan dan keberlanjutan masa depan.	
6.	Gibran Rakabuming Raka	“Desa wisata ini S dibangun dengan <i>crowdfunding</i> jadi masyarakat desa punya saham di destinasi wisata tadi.”	S	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa wisata melalui <i>crowdfunding</i> menunjukkan pemberdayaan dan kepemilikan bersama.	SG3-GI-S1
7.	Gibran Rakabuming Raka	“Program hilirisasi harus dilanjutkan dan diperluas cakupannya. Tidak hanya hilirisasi tambang saja tapi juga hilirisasi pertanian sektor maritim dan juga hilirisasi digital.”	P	Perluasan program hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah.	SG1-GI-P1
8.	Gibran Rakabuming Raka	“Izinnya dicabut IUP-nya dicabut. Simpel karena sesuai dengan Undang-ndang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 dan 4 serta Pancasila Sila ke-4 dan ke-5.”	P	Solusi tegas terhadap tambang ilegal dengan pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) sesuai dengan konstitusi dan nilai-nilai Pancasila.	SG2-GI-P2

9.	Gibran Rakabuming Raka	“Sekarang nomor satu dan nomor tiga ini kan kompak. <i>Food estate</i> gagal saya tegaskan sekali lagi Pak memang ada yang gagal tapi ada yang berhasil juga yang sudah panen. Intinya adalah warga jangan diberikan narasi-narasi yang menakutkan. Kita harus optimis Pak”	P	Gibran menekankan bahwa meskipun ada kegagalan dalam program <i>food estate</i> , ada juga yang berhasil. Ia mengajak paslon lain serta semua elemen masyarakat untuk memberikan narasi optimis kepada warga daripada narasi yang menakutkan.	SG5-GI-P3
10.	Mahfud MD	“Dalam 10 tahun terakhir terjadi deforestasi 125 hektar hutan kita itu jauh lebih luas dari Korea Selatan dan 23 kali luasnya Pulau Madura di mana saya tinggal.”	S	Deforestasi besar-besaran dalam 10 tahun terakhir dan dampaknya terhadap lingkungan.	SG2-MA-S1
11.	Mahfud MD	“Lahan berkurang petani berkurang orang desa tidak mau lagi menjadi petani karena justru rugi terkadang. Kalau ingin mendapat pupuk bersubsidi dipersulit bukan? Harus beli ke tengkulak.”	S	Masalah pengurangan lahan dan petani, serta kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi.	SG2-MA-S2
12.	Mahfud MD	“Kesimpulannya masalah agraria ini harus ada sebuah badan	P	Mahfud mengkonfirmasi perlunya badan khusus	SG5-MA-P4

khusus yang nanti menanganinya, menata kehidupan kita di bidang pertanahan sehingga proses *dealing* atau kesepakatan untuk kinan dan sertifikat tanah itu akan menjadi bagian dari apa yang sudah kami rencanakan selesai.

yang menanganinya masalah agraria, menata ulang proses sertifikasi tanah, dan memastikan penyelesaian konflik agraria sebagai bagian dari reformasi hukum nasional.

PEMBAHASAN

Gambaran kondisi sosial dalam wacana debat ke-4 calon wakil presiden Indonesia pemilu 2024

Wacana dalam debat ke-4 calon wakil presiden Indonesia pemilu 2024 mencerminkan berbagai aspek kondisi sosial di Indonesia, terutama terkait dengan etika lingkungan, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab moral terhadap alam. Menurut Fairclough (1992), wacana tidak hanya mencerminkan realitas sosial tetapi juga memainkan peran dalam membentuknya. Kondisi sosial ini mencakup berbagai aspek seperti interaksi sosial, ekonomi, perubahan sosial, dan konflik sosial.

Interaksi sosial

Salah satu contoh ungkapan yang mencerminkan masalah interaksi sosial adalah pernyataan Muhaimin Iskandar yang menekankan pentingnya menghormati masyarakat adat. “Libatkan masyarakat adat, hormati masyarakat adat, bukan hanya memakai pakaian adat setahun sekali pada 17 Agustus” (SG1-MU-S2). Dari segi interaksi sosial terlihat jelas dari ungkapan tersebut bahwa kurang adanya melibatkan masyarakat adat di setiap kebijakan yang berkaitan dengan mereka. Hal ini menandakan telah terjadi pola interaksi yang buruk antara pemangku kebijakan dengan masyarakat adat di Indonesia. Pemerintah masih kurang memerhatikan suara masyarakat adat dari berbagai aspek bahkan dalam penentuan nasib masyarakat adat itu sendiri. Muhaimin menilai kejadian

ini perlu dikoreksi karena masyarakat adat adalah warga negara yang memiliki hak sama akan sumber daya dan tanah di wilayahnya.

Ekonomi

Dalam debat cawapres Gibran mengungkapkan bahwa ada salah satu desa di Mojokerto Jawa Timur menerapkan sistem *crowd funding*, yakni pendanaan pembangunan wisata melibatkan masyarakat setempat sehingga mereka memiliki saham di destinasi wisata tersebut. “Desa wisata ini dibangun dengan crowd funding jadi masyarakat desa punya saham di destinasi wisata tadi.” (SG3-GI-S1).

Dari pernyataan tersebut sangat jelas bahwasanya penting untuk membentuk kemandirian ekonomi masyarakat dari bawah sehingga desa adalah salah satu sarana kemandirian tersebut bisa diwujudkan. Kemandirian ekonomi masyarakat desa akan memberikan kesejahteraan bagi penduduk yang sebelumnya hanya bisa mengharapkan lowongan kerja dari pemerintah ataupun perusahaan besar sehingga sekarang mampu membuat peluang kerja sendiri. Bahkan desa mampu menghidupi mayoritas penduduknya dengan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa secara profesional, transparan dan efisien.

Perubahan sosial

Pada konteks Indonesia, tantangan perubahan sosial menuju modernitas terlihat sangatlah kompleks. Diantaranya adalah penerapan perubahan sosial dalam etika lingkungan. Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa: “Krisis iklim harus dimulai dengan etika, sekali lagi etika, etika lingkungan. Etika lingkungan ini intinya adalah keseimbangan antara manusia dan alam tidak menang-menangan” (SG1-MU-S1). Ungkapan ini mencerminkan kebutuhan mendesak akan perubahan sosial dalam cara masyarakat Indonesia berinteraksi dengan lingkungan mereka. Perubahan menuju kesadaran ekologis yang lebih tinggi diperlukan untuk mengatasi krisis iklim. Namun, kenyataannya, kesadaran ini masih terbatas dan tidak merata di seluruh lapisan masyarakat. Muhaimin menganggap bahwa perubahan sosial yang mendalam diperlukan untuk mendorong masyarakat Indonesia agar lebih peduli terhadap lingkungan dan mengadopsi praktik-praktik sosial yang berkelanjutan.

Konflik sosial

Dalam konteks Negara Indonesia banyak sekali konflik sosial yang telah terjadi. Sesuai dengan kondisi tersebut Mahfud MD mengungkapkan “Dalam 10 tahun terakhir,

terjadi deforestasi 125 hektar hutan kita. Itu jauh lebih luas dari Korea Selatan dan 23 kali luasnya Pulau Madura di mana saya tinggal.” (SG2-MA-S1). “Lahan berkurang, petani berkurang, orang desa tidak mau lagi menjadi petani karena justru rugi terkadang. Kalau ingin mendapat pupuk bersubsidi dipersulit bukan? Harus beli ke tengkulak.” (SG2-MA-S2). Kondisi yang diungkapkan oleh Mahfud tersebut dapat memicu gerakan protes dari para petani yang merasa dirugikan karena lahan dan pangan mereka semakin terancam keberadaannya. Ada kemungkinan jika permasalahan ini tidak segera diselesaikan dapat memicu sebuah konflik antara petani dengan pemerintah daerah atau pihak lain yang terkait di dalamnya. Petani akan menuntut kembali atas lahan, kebun dan hutannya yang semakin berkurang akibat proyek-proyek masuk. Petani juga akan menuntut haknya untuk mendapatkan kemudahan akses pupuk yang sebelumnya dimanipulasi peredarannya oleh para mafia.

Gambaran situasi politik dalam wacana debat ke-4 calon wakil presiden Indonesia pemilu 2024.

Wacana dalam debat ke-4 calon wakil presiden Indonesia pemilu 2024 juga mencerminkan situasi politik di Indonesia, terutama terkait dengan krisis petani gurem, program hilirisasi, dan ketidakseimbangan sumber daya alam. Ada beberapa hal yang bisa digunakan untuk melihat situasi politik di sebuah wilayah atau negara, yakni dari segi penentuan tujuan sistem dan kebijakan umum, penggunaan kekuasaan dan wewenang, dan penyelesaian konflik atau konsensus. Berikut pembahasannya.

Penentuan Tujuan Sistem dan Kebijakan Umum

Penentuan tujuan dalam sistem politik merupakan langkah awal yang krusial dalam setiap agenda politik. Dalam debat cawapres para kontestan menyatakan tujuan mereka secara jelas karena di dalamnya terdapat arah sistem politik dan kebijakan umum yang hendak dilaksanakan ketika nanti terpilih. Contohnya Muhaimin Iskandar menyampaikan pentingnya implementasi perangkat perundang-undangan untuk petani dan produksi pangan. Ia mengatakan, “Seluruh perangkat undang-undang yang menyangkut perlindungan petani dan produksi kita sebenarnya sudah lengkap, yang dibutuhkan hanyalah implementasi dari seluruh proses hukum yang kita miliki, kemampuan politik dan kesungguhan” (SG2-MU-P2).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa salah satu tujuan sistem politik Muhaimin adalah mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang melindungi petani dan para produsen pangan. Muhaimin menganggap petani dan para produsen pangan masih rentan dari segi perlindungan hukum sehingga hak-hak dan keberlanjutan aktivitasnya belum terjamin secara pasti oleh negara. Pernyataan ini menggambarkan bahwa pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan kebijakannya belum mampu mewadahi hak-hak petani dan produsen pangan. Dari pembahasan tersebut bisa disimpulkan bahwa petani dan produsen pangan sebagai penyokong ketersediaan pangan nasional belum menjadi prioritas di dalam sistem perundang-undangan di Indonesia.

Fokus pada hal lain, Gibran Rakabuming Raka menekankan pentingnya agenda hilirisasi. “Program hilirisasi harus dilanjutkan dan diperluas cakupannya. Tidak hanya hilirisasi tambang saja tapi juga hilirisasi pertanian sektor maritim dan juga hilirisasi digital” (SG1-GI-P1). Gibran menyoroti pentingnya hilirisasi sebagai strategi utama untuk meningkatkan nilai produksi dan mengurangi ketergantungan Indonesia pada ekspor bahan mentah. Gibran menekankan bahwa program hilirisasi tidak boleh hanya terbatas pada sektor pertambangan, tetapi juga harus mencakup sektor pertanian, maritim, dan bahkan sektor digital.

Berbeda dengan Gibran, Mahfud MD lebih menekankan pentingnya penanganan masalah agraria di Indonesia melalui pembentukan badan khusus yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penataan pertanahan. “Kesimpulannya masalah agraria ini harus ada sebuah badan khusus yang nanti menangani, menata kehidupan kita di bidang pertanahan sehingga proses dealing atau kesepakatan untuk kinan dan sertifikat tanah itu akan menjadi bagian dari apa yang sudah kami rencanakan selesai” (SG5-MA-P4).

Mahfud menyoroti pentingnya penanganan masalah agraria di Indonesia melalui pembentukan badan khusus yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penataan pertanahan. Mahfud MD menekankan bahwa persoalan agraria, terutama yang berkaitan dengan sertifikasi tanah dan konflik pertanahan, memerlukan perhatian khusus dan penanganan yang sistematis. Mahfud MD menggarisbawahi persoalan agraria, terutama yang berkaitan dengan sertifikasi tanah dan konflik pertanahan, memerlukan perhatian khusus dan penanganan yang sistematis.

Kekuasaan dan Wewenang

Kekuasaan dan wewenang dalam wacana politik digunakan untuk mencapai dan menerapkan kebijakan umum yang diusung oleh para calon. Dalam konteks debat cawapres, para kontestan menyampaikan bagaimana mereka akan menggunakan kekuasaan untuk mencapai tujuan mereka. Contohnya, Muhaimin menyoroti kendala dalam reforma agraria dengan menyatakan, “Banyak masalah yang menjadi kendala terlaksananya reforma agraria salah satunya birokrasi kita kesungguhan politik kita dan kemauan kepemimpinan di bawah presiden. Saya tidak menyalahkan siapapun ya ini sebuah fakta yang harus kita antisipasi bersama. Saya hanya mengajak untuk kita sama-sama tobat ekologis memperbaiki ke depan menjadi lebih baik lagi” (SG5-MU-P2).

Muhaimin mengakui bahwa salah satu kendala utama dalam pelaksanaan reforma agraria adalah birokrasi yang rumit dan lamban. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kebijakan yang baik di tingkat pusat, pelaksanaannya sering terhambat oleh sistem birokrasi yang tidak efisien. Dalam hal ini, penggunaan kekuasaan oleh Muhaimin jika terpilih akan berfokus pada reformasi birokrasi untuk memastikan bahwa kebijakan agraria dapat diimplementasikan dengan lebih efektif dan cepat. Ia menyadari bahwa tanpa perubahan dalam cara birokrasi bekerja, reforma agraria yang seharusnya menguntungkan masyarakat justru menjadi terhambat dan tidak mencapai tujuannya.

Berbeda dengan Muhaimin, dalam konteks penggunaan kekuasaan dan wewenang Gibran fokus menyoroti permasalahan tambang ilegal. “Izinnya dicabut IUP-nya dicabut. Sempel karena sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 dan 4 serta Pancasila Sila ke-4 dan ke-5” (SG2-GI-P2). Gibran menawarkan solusi tegas yaitu pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) bagi perusahaan yang terbukti melakukan praktik tambang ilegal.

Gibran mengacu pada Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Dengan dasar ini, Gibran menegaskan bahwa izin pertambangan (IUP) yang diberikan oleh negara harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang mendukung kepentingan umum dan keberlanjutan lingkungan. Tambang ilegal, yang sering kali merusak lingkungan dan merugikan masyarakat sekitar, jelas bertentangan dengan semangat Pasal 33 ini.

Pasal 33 ayat 4 menyatakan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan,

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Tentu sudah sangat jelas bahwa pasal ini juga mengatur tentang pentingnya efisiensi dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam, serta kewajiban untuk mempertahankan kelestarian lingkungan hidup. Gibran menegaskan bahwa jika perusahaan tambang melanggar prinsip-prinsip ini, negara memiliki kewenangan penuh untuk mencabut izin operasionalnya sebagai bentuk penegakan hukum dan perlindungan terhadap kepentingan publik.

Gibran juga mengaitkan pendekatannya dengan nilai-nilai Pancasila, terutama Sila ke-4 dan ke-5. Sila ke-4, yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,” menekankan pentingnya partisipasi rakyat dan kepemimpinan yang bijaksana. Dalam konteks ini, pencabutan IUP bagi tambang ilegal dapat dilihat sebagai langkah untuk menegakkan keadilan yang sesuai dengan kehendak rakyat dan menjaga kepentingan umum melalui keputusan yang bijaksana.

Sementara itu, Sila ke-5, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi sumber daya dan perlindungan terhadap eksploitasi yang merugikan rakyat. Tambang ilegal sering kali menyebabkan ketidakadilan, di mana masyarakat sekitar mengalami kerusakan lingkungan tanpa mendapat manfaat ekonomi yang adil. Dengan mencabut izin tambang ilegal, Gibran ingin memastikan bahwa sumber daya alam dikelola secara adil untuk kesejahteraan semua warga negara, bukan hanya untuk kepentingan segelintir pihak.

Sementara itu Mahfud menggambarkan bagaimana penggunaan kekuasaan dan wewenangnya dengan menyampaikan pengalamannya sebagai ketua MK. “Pada 16 Juni 2011, sebagai Ketua MK, saya sudah mengatakan apa-apa yang diperlukan untuk ini. Saya membuat vonis tanggal 16 Juni bahwa sumber alam itu untuk memihak rakyat” (SG1-MA-KD1).

Pernyataan Mahfud tersebut mengacu pada pengalamannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) pada 16 Juni 2011 mengandung makna yang mendalam terkait dengan kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Dalam pernyataan tersebut, Mahfud menegaskan bahwa putusan MK yang ia pimpin telah menekankan prinsip bahwa sumber daya alam harus digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan hanya untuk keuntungan segelintir pihak.

Mahfud secara tersirat mengingatkan publik tentang peran penting MK dalam menjaga konstitusionalitas kebijakan negara, termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya alam. Sebagai Ketua MK, Mahfud terlibat dalam pengambilan keputusan yang menegaskan bahwa segala bentuk pengelolaan dan eksploitasi sumber daya alam harus selalu berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Ini sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Penyelesaian Konflik dan Konsensus

Penyelesaian konflik dan pencapaian konsensus adalah aspek penting dalam wacana politik, yang ditujukan untuk menciptakan harmoni dalam masyarakat. Dalam konteks debat cawapres para kontestan menyatakan pendekatan mereka terhadap penyelesaian konflik. Sebagai contoh, Muhaimin mengusulkan adanya konsep tobat ekologis dalam agenda reforma agraria seperti yang sudah dibahas sebelumnya. “Banyak masalah yang menjadi kendala terlaksananya reforma agraria salah satunya birokrasi kita kesungguhan politik kita dan kemauan kepemimpinan di bawah presiden. Saya tidak menyalahkan siapapun ya ini sebuah fakta yang harus kita antisipasi bersama. Saya hanya mengajak untuk kita sama-sama tobat ekologis memperbaiki ke depan menjadi lebih baik lagi.” (SG5-MU-P2).

Muhaimin mengakui bahwa salah satu kendala utama dalam pelaksanaan reforma agraria adalah birokrasi yang rumit dan lamban, serta kurangnya kesungguhan politik dari berbagai pihak. Ia menekankan bahwa reforma agraria memerlukan kemauan dan kepemimpinan yang kuat dari presiden hingga jajaran bawahannya. Dengan mengungkapkan hal ini, Muhaimin tidak bermaksud untuk menyalahkan pihak tertentu, melainkan mengajak semua pihak untuk menyadari masalah yang ada dan bersama-sama mencari solusi.

Bebeda posisi dengan Muhaimin, Gibran mencoba menjawab isu bahwa program *food estate* telah gagal, seperti yang digaung-gaungkan oleh cawapres 01 dan 03 beserta timsesnya. “Sekarang nomor satu dan nomor tiga ini kan kompak. *food estate* gagal. Saya tegaskan sekali lagi, Pak memang ada yang gagal, tapi ada yang berhasil juga yang sudah panen. Intinya adalah warga jangan diberikan narasi-narasi yang menakutkan. Kita harus optimis Pak” (SG5-GI-P3). Gibran menilainya sebagai masalah karena masyarakat akan

terpapar penggiringan opini yang memuat informasi kurang lengkap. Menurutnya para paslon lain beserta oposisi mencoba membuat narasi negatif tentang *food estate* untuk menyerang pemerintah dan program keberlanjutan yang diusungnya.

Pernyataan Gibran terkait program *food estate* menampilkan pendekatan diplomatis dalam menyelesaikan konflik dan mencapai konsensus, terutama ketika menghadapi kritik dari lawan politiknya. Gibran secara tegas menanggapi opini negatif dari Cawapres 01 dan 03 yang menyatakan bahwa program *food estate* gagal. Ia mengakui bahwa memang ada kegagalan, tetapi juga menekankan bahwa ada bagian dari program tersebut yang berhasil dan sudah menunjukkan hasil panen.

Pendekatan Gibran menunjukkan kematangan dalam berpolitik, di mana ia tidak langsung membantah kritik secara keseluruhan, tetapi memilih untuk memberikan perspektif yang lebih seimbang. Dengan mengakui adanya kegagalan namun juga menyebut keberhasilan, Gibran mencoba untuk mengurangi ketegangan dan membuka ruang dialog yang lebih konstruktif. Ini mencerminkan upaya untuk mencapai konsensus dengan cara yang tidak defensif, melainkan dengan mengarahkan perhatian pada sisi positif dan keberhasilan yang telah dicapai.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis wacana kritis terhadap debat ke-4 calon wakil presiden Indonesia Pemilu 2024, dapat disimpulkan bahwa wacana yang diangkat dalam debat ini tidak hanya memperlihatkan pertarungan argumen antar calon, tetapi juga merefleksikan kondisi sosial dan politik yang sedang terjadi di Indonesia. Dalam konteks debat tersebut, isu-isu sosial seperti etika lingkungan dan peran masyarakat adat menjadi fokus utama, menunjukkan bahwa calon-calon wakil presiden berusaha merespons tantangan sosial dan ekologis yang dihadapi oleh negara. Secara politik, debat ini juga mencerminkan dinamika kekuasaan dan upaya untuk mencapai konsensus di tengah keberagaman pandangan yang ada. Dengan demikian, wacana dalam debat ini bukan hanya alat retorika, tetapi juga representasi dari kondisi sosiopolitik yang kompleks di Indonesia pada masa pemilihan umum.

DAFTAR PUSTAKA

Baumgartner, J. C. (2006). *Wakil Presiden Amerika: Tinjauan Kembali*. Westport, CT: Praeger.

- Budiardjo, J. (2010). *Politik dan Demokrasi*. Jakarta: Gramedia.
- Dahl, R. A. 1971. *Poliarki: Partisipasi dan Oposisi*. *New Haven: Yale University Press*.
- Darma, Y. (2009). *Analisis Wacana Kritis: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Durkheim, E. (1893). *The division of labor in society*. New York: Free Press.
- Eriyanto. (2001). *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS.
- Fairclough, N. (1995). *Analisis Wacana Kritis: Studi Kritis Bahasa*. London: Longman.
- Gunawan, I. P. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Marx, K. (1867). *Das Kapital: Critique of political economy*. Hamburg: Otto Meissner Verlag.
- Maulida, J. (2018). *Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough Cerpen Jangan Panggil Aku Katua Karya Yulhasni*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sinta, K. (2022). *Analisis Wacana Kritis Nourman Fairclough terhadap Jokowi yang Menyentil Menterinya Mengenai Kenaikan Harga Minyak Goreng*. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 291-300.
- Soekanto, S. (2002). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sudaryanto. (2019). *Analisis Wacana Debat Pertama Capres dan Cawapres Pemilu 2019*. *Prosiding Seminar Nasional Linguistik dan Sastra (SEMANTIKS)*.
- Toulmin, S. (1958). *Penggunaan Argumen*. Cambridge University Press.
- van Dijk, T. A. (1997). *Wacana sebagai Struktur dan Proses*. London: Sage Publications.